



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka penyusunan dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah adalah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 berdasarkan prioritas RKPD tahun 2024 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang timbul saat ini, serta memuat rancangan program, kegiatan, sub kegiatan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju tahun 2024 dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024 dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Demak, Agustus 2023



KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN DEMAK

KENDARSIN IRIANI, SH, MH
NIP. 19700708 199503 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I.

PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

 1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2022 dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol 23

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah 25

 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 46

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 46

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 47

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 50

BAB V.

PENUTUP 59

 5. 1 Catatan Penting 59

 5. 2 Kaidah Pelaksanaan..... 59

 5. 3 Rencana Tindak Lanjut..... 60

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, dan merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Tema pembangunan tahun 2024 disintesis dari visi RPJPD, tema RKP 2024, tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2020. Terdapat tiga

kata kunci yang tersurat maupun tersirat dalam setiap visi/tema pembangunan, yaitu : kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Demak ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Pada masing-masing tema/fokus disusun arah kebijakan pembangunan yang akan ditangani, untuk tema pembangunan tahun 2024 adalah

”PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI BERBASIS
POTENSI LOKAL”,

Tema tersebut dipilih mengarah pada kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui upaya-upaya penciptaan sentra-sentra ekonomi rakyat dan promosi komoditas unggulan daerah. Penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara regional dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Demak. Potensi lokal yang dimaksud adalah lapangan usaha yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah dan sector lain yang berpotensi menyumbang kenaikan PDRB secara signifikan, yaitu lapangan usaha pertanian, perikanan, industri (termasuk UMKM) dan perdagangan. Potensi lainnya yaitu sektor pariwisata yang menjadi penggerak lapangan usaha lainnya serta sektor teknologi informasi.

Penguatan daya saing ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, RKPd Kabupaten Demak tahun 2024 fokus pada peningkatan efektifitas capaian rencana pembangunan yang diarahkan terutama untuk : penuntasan program unggulan daerah tahun 2021-2026, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting menjadi 15,12 % dan implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh Bidang yang ada. Masing-masing Bidang wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan bersama.

Proses penyusunan Rencana Kerja juga tidak terlepas dari penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum perangkat daerah dan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Demak di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja PD berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka pendanaan dan program kegiatan PD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 31. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
 32. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 33. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 34. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Demak dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan penyusunan Renja adalah

1. Menjabarkan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026 dalam rencana program dan kegiatan;
2. Sebagai pedoman bagi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Menjadi acuan bagi Badan Kesbangpol dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Rencana Kerja PD
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Menguraikan tentang kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2022.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tentang Tujuan dan Sasaran yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang merupakan tahun Ketiga Renstra 2021-2026
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak
Tahun 2024 beserta kerangka pendanaannya.

BAB V

Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Badan Kesbangpol tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mencapai kinerja 3 tujuan Renstra Bakesbangpol yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP dan Angka Kejadian Konflik Sosial, serta mencapai kinerja 5 sasaran yaitu persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol yang mencapai target, Kasus konflik antar/intra umat beragama, Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik dan Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa.

Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tahun 2022 adalah menitikberatkan pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Menitikberatkan pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Daya Saing Ekonomi dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sempat terkena dampak pandemi Covid-19 dan yang kemungkinan masih terasa dampaknya di tahun 2022

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bakesbangpol tahun 2022 sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja. Untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran Bakesbangpol didukung dengan 6 Program, 6 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan total anggaran murni sebesar Rp. 11.319.273.665,- (sebelas milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sebagian besar merupakan usulan pikir anggota dewan dan usulan masyarakat berupa hibah dan kegiatan Rp. 6.300.000.000,-

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2022 diatur bahwa Pemilihan Umum Serentak akan dilaksanakan Tahun 2024, sehingga meskipun tahun 2022 bukan tahun politik semua pihak sudah mulai mempersiapkan untuk kontestasi pada Pemilu Serentak 2024 tersebut.

Pokok-pokok pikiran anggota DPRD di Tahun 2022 banyak yang masuk ke Badan Kesbangpol baik berupa kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila, wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah dan Pencegahan Faham Radikalisme serta untuk Pendidikan Politik masyarakat juga banyak yang diajukan untuk Hibah kepada Organisasi Kamasyarakatan.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas kegiatan, dilakukan penghitungan ulang beberapa kegiatan dan dilakukan pergeseran untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah terutama penambahan barang inventaris untuk menjuang pelayanan. Sementara itu anggaran hibah dari pokir dewan yang rencana diperuntukkan ormas SOKSI dialihkan ke perangkat daerah lain. Sehingga di Tahun 2022 APBD Perubahan Anggaran Badan Kesbangpol menjadi Rp. 11.043.475.097,- (sebelas milyar empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 10.622.006.524,- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 96,18%

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2022 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini mempunyai 2 indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti terealisasi 100% dari target dan persentase pelayanan yang sesuai standar pelayanan juga terealisasi 100%, sehingga tingkat ketercapaian sebesar 100%.

Program ini didukung 6 kegiatan dan 17 Sub kegiatan dengan indikator kinerja yang hampir seluruhnya terealisasi 100% hanya di sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah ASN yang terbayarkan gaji terealisasi 92% dikarenakan jumlah PNS sampai dengan Desember 2022

sebanyak 11 orang sedangkan di sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar 144%. Anggaran program ini sebesar Rp. 2.273.937.097,- tersebut digunakan dan teralisasi sebesar Rp. 2.061.704.124 secara umum tidak ada kendala yang berarti, meskipun hanya sebesar 91,97% dikarenakan besarnya pagu gaji PNS yang tidak bisa terealisasi dikarenakan belum definitifnya pejabat Badan Kesbangpol.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022 (100%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu mengutamakan atau melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertikal maupun lintas horizontal.

Sampai dengan akhir semester 1 Tahun 2023 kedua indikator tercapai 100%.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.

Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan ini mendukung visi Pemerintah Kabupaten Demak yaitu Bermartabat, melalui penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan diharapkan masyarakat Kabupaten Demak karakter yang berlandaskan pada Pancasila. Program ini mempunyai indikator kinerja Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan dengan target 75% dan terealisasi 76,4% dengan tingkat ketercapaian sebesar 101,9%.

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.336.903.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.213.496.700,- atau 90,8%. Sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran, dan juga ada beberapa pekerjaan atau aktivitas berupa upacara yang masih dilaksanakan secara virtual, yang berpengaruh pada realisasi anggaran. Keberhasilan Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022 (100%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas

bidang maupun lintas perangkat daerah/vertikal maupun lintas horizontal dan adanya komitmen dari stakeholder.

Kendala yang ada adalah jadwal kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat sepenuhnya terlaksana sesuai perencanaan dikarenakan adanya kegiatan yang merupakan aspirasi/pokir anggota dewan, sehingga menyesuaikan jadwal anggota dewan.

Sampai dengan akhir semester 1 Tahun 2023 indikator tersebut belum dilakukan penghitungan/penilaian, dan akan diketahui semester 2.

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Program ini dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah yaitu peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini menetapkan Indikator yaitu Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 74% dan terealisasi sebesar 75,6% dengan ketercapaian 102,2%.

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.523.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.492.797.700,- atau 97,8%, seperti halnya dengan program di atas, anggaran program bidang politik ini paling banyak dipergunakan untuk Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Demak yaitu sebanyak 8 Partai. Hibah ke Parpol baru bisa direalisasikan setelah hasil evaluasi dari BPK atas penggunaan hibah tahun sebelumnya diterbitkan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022 (100%) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertikal maupun lintas horizontal dan adanya komitmen dari stakeholder.

Sampai dengan akhir semester 1 Tahun 2023 indikator tersebut belum dilakukan penghitungan/penilaian, dan akan diketahui semester 2.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

Pada program ini menetapkan indikator Persentase ormas yang terdaftar dan aktif sebesar 68%, indikator ini dapat tercapai melalui beberapa aktifitas meliputi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Dari terget tersebut terealisasi 68% dengan ketercapaian 100%.

Keberhasilan pencapaian taget program ini karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat yang tergabung dalam kelompok atau organisasi melaporkan keberadaannya, Bakesbangpol dalam setiap kesempatan juga mensosialisasikan pentingnya pendaftaran dan atau pelaporan keberdaaan ormas.

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 4.422.397.600 dan terealisasi sebesar Rp. 4.419.595.000,- atau 99,94% secara umum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan lebih banyak untuk hibah ormas, kendala yang ada adalah adanya kekurangakuratan rencana penggunaan anggaran hibah sehingga tidak dapat terlaksana sesuai rencana dan dikembalikan ke kas daerah.

Sampai dengan akhir semester 1 Tahun 2023 indikator tersebut belum dilakukan penghitungan/penilaian, dan akan diketahui semester 2.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini untuk mendukung sasaran Bakesbangpol yaitu Kasus Konflik antar umat beragama, Bakesbangpol menetapkan sasaran tersebut karena sentimen agama mempunyai efek yang sangat besar, konflik yang dipicu oleh agama akan sulit diredam, oleh karena itu selama kurun waktu lima tahun periode diharapkan tercipta kerukunan umat beragama.

Pada program ini menetapkan indikator kinerja yaitu Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama

sebesar 75% dan terealisasi sebesar 78% dengan tingkat ketercapaian 104%. Capaian ini menjadai gambaran bahwa kerukunan umat bergama sangat penying.

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 424.835.000 dan terealisasi sebesar Rp. 399.104.000,- atau 93,9% secara umum dapat terlaksana dengan baik, permasalahan yang timbul adalah ada satu kegiatan yang karena satu hal hampir tidak dapat terlaksana, sehingga dibuat inovasi dengan membuat podcast pencegahan penyalahgunaan narkoba di radio RSKW, diharapkan jangkauan sosialisasi lebih banyak dan jauh dengan biaya yang sedikit.

Sampai dengan akhir semester 1 Tahun 2023 indikator tersebut belum dilakukan penghitungan/penilaian, dan akan diketahui semester 2.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Program ini menetapkan indikator Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial, sampai dengan tahun 2022 terdapat 7 potensi konflik yang terjadi dan telah dilakukan penyelesaian potensi konflik tersebut sehingga tercapai 100%

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.061.592.400 dan terealisasi sebesar Rp. 1.035.309.000,- atau 97,5% secara umum dapat terlaksana dengan baik, permasalahan selain karena refocussing adalah aturan pemberian honor berdasarkan Perpres 33 Tahun 2020 khususnya untuk honor forkopimda, solusi yang dilakukan yaitu dengan refocussing/pergeseran anggaran.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol s/d Tahun 2022 ditampilkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESBANGPOL

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0 %	1 Dokumen	100,0 %
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji & tunjangannya	12 Orang	11 Orang	12 Orang	11 Orang	91,7 %	11 Orang	91,7 %
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honorarium ASN dan Non-ASN pendukung pelaksanaan tugas yang terbayar	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100,0 %	12 Orang	100,0 %
8	1					Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,00	100,0 %
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,0 %	100 Persen	100,0 %
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Orang	20 Orang	20 Orang	100,0 %	20 Orang	100,0 %
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,0 %	100 Persen	100,0 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
										Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
8	1	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	12 Paket	12 Paket	100,0 %	12 Paket	80,0 %
8	1	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,0 %	2 Paket	100,0 %
8	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100,0 %	4 Paket	200,0 %
8	1	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0 %	2 Dokumen	200,0 %
8	1	1	2.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,0 %	1 Laporan	20,0 %
8	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342 Laporan	26 Laporan	41 Laporan	59 Laporan	143,9 %	85 Laporan	24,9 %
8	1	1	2.07			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah BMD yang diadakan</i>	14 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100,0 %	6 Unit	42,9 %
8	1	1	2.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100,0 %	3 Unit	100,0 %
8	1	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,0 %	4 Unit	80,0 %
8	1	1	2.07	# #		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	100,0 %	4 Unit	100,0 %
8	1	1	2.08			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</i>	100 Persen	Persen	100 Persen	100 Persen	100,0 %	100 Persen	100,0 %
8	1	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,0 %	12 Laporan	20,0 %
8	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,0 %	12 Laporan	20,0 %
8	1	1	2.09			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah BMD yang terpelihara</i>	4 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100,0 %	4 Unit	100,0 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021- 2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100,0 %	11 Unit	100,0 %
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,0 %	1 Unit	100,0 %
8	1	1	2.09	# #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	100,0 %	10 Unit	100,0 %
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	86,0 %	%	75,0 %	76,4 %	101,9 %	76,4 %	88,8 %
8	1	2	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>100,0 %</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>100,0 %</i>
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11050 Orang	Orang	2380 Orang	2380 Orang	100,0 %	2380 Orang	21,5 %
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 Orang	Orang	250 Orang	250 Orang	100,0 %	250 Orang	16,7 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	82,0 %	,0 %	74,0 %	75,6 %	102,2 %	75,6 %	92,2 %
8	1	3	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100 %</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100 %</i>
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1820 Orang	Orang	600 Orang	600 Orang	100 %	600 Orang	33 %
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	20 %
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	74,0 %	66,0 %	68,0 %	68,0 %	100,0 %	68,0 %	91,9 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun	2 Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,0 %	2 Dokumen	100,0 %
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2050 Orang	Orang	60 Orang	60 Orang	100 Orang	60 Orang	2,9 %
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,0 %	12 Laporan	20,0 %
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	90,0 %	,0 %	75,0 %	78,0 %	104,0 %	78,0 %	86,7 %
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun	3 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,3 %	1 Dokumen	33,3 %
8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0 %	1 Dokumen	25,0 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021- 2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2300 Orang	Orang	190 Orang	190 Orang	100,0 %	190 Orang	8,3 %
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,0 %	12 Laporan	20,0 %
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,0 %	,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
8	1	6	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani</i>	<i>60 Laporan</i>	<i>Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>100,0 %</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>20,0 %</i>
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 Orang	Orang	200 Orang	200 Orang	100,0 %	200 Orang	25,0 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Akhir Renstra 2022-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2026	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 Orang	56 Orang	56 Orang	56 Orang	100,0 %	56 Laporan	100,0 %
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,0 %	12 Laporan	20,0 %
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,0 %	12 Laporan	20,0 %

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Kode Subkegiatan
					Target	Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)*100	11=(9/7)*100	12
					N I H I L						

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Pemerintahan Umum, salah satu tugas utamanya yaitu menciptakan kondusifitas wilayah.

Dengan terwujudnya wilayah Kabupaten Demak yang kondusif diharapkan Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat dengan ditandai meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Demak. Meskipun bukan satu-satunya indikator yang mempengaruhi peningkatan nilai investasi di daerah, namun dengan kondusifitas yang stabil maka investor memiliki modal awal untuk berinvestasi.

Selama kurun waktu 2 tahun pelaksanaan program dan kegiatan secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik, Badan Kesbangpol dengan adanya perubahan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tidak lagi mengampu IKK maupun SPM.

Namun demikian Badan Kesbangpol tetap melaksanakan tugas bidang pemerintahan umum dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ketiadaan indikator Output dan outcome IKK dan SPM maka Indikator kinerja yang telah ditetapkan diharapkan juga mampu menjawab sebagian indikator yang ada dalam SDGs, indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dan indikator lain yang sebagai data dukung penilaian Pemerintah Kabupaten Demak

Indikator kinerja yang dijadikan acuan Badan Kesbangpol dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan melalui survei kepada masyarakat baik yang telah kegiatan sosialisasi, workshop maupun yang belum.

Selain itu juga mengacu indek ormas yaitu persentase ormas aktif yang merupakn IKK, dalam indikator tersebut tertulis dengan kata LSM namun pengertian LSM dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak ada bedanya sehingga masuk ke Bakesbangpol.

Pencapaian pelayanan kinerja perangkat Daerah digambarkan dalam table 2.2 berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kesbangpol
Kabupaten Demak

No	Indikator	IKU	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	V	-	-	86,49	88,2	89,5	90,8	87	88,3	89,5	90,8	
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	V	-	-	73,43	77,3	79,18	80,07	73,43	77,91	79,18	80,07	
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol yang mencapai target	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Angka Kejadian Konflik Sosial	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0= tidak ada kejadian
6	Kasus konflik antar umat beragama	V	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0= tidak ada Kasus
7	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik	V	-	-	73,4	74,5	76,08	78,1	73,4	78,1	74,50	76,08	
8	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	V	-	-	78	79,3	81,2	82,8	78	82,8	79,30	81,20	
9	Persentase Ormas aktif	-	-	V	67	68	70	71	67	68	70	71	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 dan 2023 program kegiatan Badan Kesbangpol tetap difokuskan pada terciptanya kondusifitas wilayah, Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak yaitu pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif yang akan dilaksanakan bulan Februari 2024 dan pemilihan serentak Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/Walikota di Bulan Nopember 2024 di Kabupaten Demak berpotensi menimbulkan potensi konflik, penguatan karakter kebangsaan melalui Penguatan Ideologi Pancasila, pendidikan wawasan kebangsaan dan Bela Negara, dan pendidikan politik masyarakat serta peningkatan kapasitas Ormas sehingga berkontribusi positif terhadap persatuan dan kesatuan wilayah sebagai bagian dari NKRI. Tahun 2023 sebagai tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021 – 2026, diwarnai dengan berjalannya program kegiatan sebagai upaya percepatan pencapaian program unggulan Bupati yang mendukung visi misi Bupati/Wakil Bupati periode tahun 2021 – 2026.

Upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pemilu serentak bisa terselenggara dengan baik dan sukses tanpa ekses guna mewujudkan kondusifitas wilayah.

Badan Kesbangpol berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secara tegas dinyatakan bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan umum yang terdiri dari

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kebijakan Pemerintah dalam proses pelayanan kepada masyarakat mengharuskan penghapusan proses birokrasi yang terlalu lama dan berjenjang, sehingga setiap perangkat daerah hanya ada 2 (dua) tingkat struktural. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pendewasaan politik yang salah satunya ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan serentak, yaitu pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Demak patut mendapatkan catatan tersendiri. Tingkat partisipasi masyarakat Demak dalam Pilkada serentak tersebut mencapai 82,46%. Angka ini melebihi dari target capaian pada Badan Kesbangpol sebesar 70% dan juga target KPU sebesar 77%. Pada perhelatan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diselenggarakan di masa pandemi diwarnai dengan

adanya tuntutan penundaan pelaksanaan partisipasi pemilih masih mencapai 73,4% sedikit diatas target Badan Kesbangpol meskipun masih dibawah target KPU. Namun untuk tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilukada Gubernur masih sangat rendah yaitu 57,48% .

Berkaca dari hasil pemilu serentak pemilihan legislatif dan presiden yang tinggi, diharapkan pemilu serentak kepala daerah juga meingkat bila dibandingkan tahun sebelumnya terutama pemilihan Gubernur.

Pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat bidang politik, diharapkan akan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan di daerah. Ormas sebagai salah satu pilar politik juga perlu dilakukan pemberdayaan.

“SETARA Institute for Democracy and Peace” telah melakukan survei di 5 kota besar di Indonesia yaitu di Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta dan Padang. Metode pengumpulan data dilakukan oleh surveyor secara face to face interview dengan Metode Purposive sampling digunakan untuk menentukan sekolah-sekolah yang dituju. Selanjutnya surveyor mengambil sampling dengan metode simple random sampling untuk menetapkan siswa SMA sebagai responden. Jumlah sampel yang sebanyak sebanyak 947 dengan margin of error 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Penelitian diselenggarakan pada Januari-Maret 2023

Salah satu Hasil temuan survei tersebut Temuan terkait **syariat Islam sebagai landasan bernegara**, didukung oleh 56,3% responden. Oleh karenanya, dukungan terhadap persepsi bahwa **Pancasila sebagai bukan ideologi yang permanen**, artinya bisa diganti, juga sangat besar yakni 83,3% responden.

Meskipun survei dilakukan hanya di 5 kota, tidak tertutup kemungkinan di wilayah Kabupaten Demak para generasi muda khususnya anak setingkat SLTA akan mempunyai persepsi bahwa Pancasila bukan Ideologi Permanen atau bisa diganti.

Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme khususnya dikalangan generasi muda milenial dan adanya indikasi kegiatan eksklusif yang mengarah pada tindakan radikalisme dan terorisme yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah menyebabkan menurunnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa.

Sebagaimana tertera dalam Renstra Badan Kesbangpol tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021 – 2026, telah dirumuskan beberapa isu strategis. Berdasarkan dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Demak pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol Kabupaten Demak berdasarkan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol, yaitu

- a. Kurang optimalnya pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol
- b. Kurang optimalnya pelayanan publik Badan Kesbangpol
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat bidang politik
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa
- e. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan Antar Umat Beragama

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan isu strategis tersebut, rencana kerja Badan Kesbangpol tahun 2024 diarahkan pada upaya

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketahanan bangsa meliputi peningkatan kerukunan umat beragama, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan berupa penguatan Ideologi Pancasila, Bela Negara, pembauran kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan.
3. Meningkatkan peran masyarakat dan terjalinnya koordinasi serta komitmen antara aparat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah melalui Penanganan Konflik Sosial dan fasilitasi Forkopimda.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat melalui pendidikan politik bagi generasi muda berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat khusus yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan untuk turut serta aktif dalam proses demokratisasi di Kabupaten Demak.
6. Meningkatkan tertib administrasi dan kinerja pelayanan publik sesuai tupoksi.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam pelaksanaan 6 program dan 10 kegiatan serta 43 Sub Kegiatan. Adapun dari 6 program tersebut terdiri dari 1 program rutin yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dan 5 program prioritas. Lima program prioritas tersebut meliputi

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Kegiatan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Setelah rencana kerja awal disusun dilakukan pembahasan melalui forum perangkat daerah dan musrenbang, kegiatan/sub kegiatan yang dirasa kurang memenuhi prioritas kemudian dipending dan guna mengakomodir usulan ditambahkan pada sub kegiatan yang lain.

Percepatan pencapaian program unggulan Pemerintah Kabupaten Demak dan gelaran pelaksanaan Pemilu serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah turut mempengaruhi alokasi anggaran perangkat daerah termasuk Badan Kesbangpol yang kebetulan tidak mengampu program unggulan. Perangkat Daerah yang mengampu program unggulan diberikan kesempatan untuk memacu pencapaian target termasuk anggaran.

Pelaksanaan Pemilu serentak Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah khususnya Kabupaten Demak sampai dengan penyusunan renja awal belum ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Jawa tengah terkait dengan pembiayaan bersama pelaksanaan Pemilu kepala daerah.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mengamantkan bahwa Program Paskibraka dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Program Paskibraka yang semula ada di Dinas Pemuda dan Olahraga mulai Tahun 2024 beralih ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, pada Program Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdapat tambahan 5 sub kegiatan, namun karena keterbatasan anggaran Bakesbangpol hanya mengambil 1 sub kegiatan yaitu pembentukan Paskibraka, sedangkan aktifitas lain yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut akan diikutsertakan dalam sub kegiatan yang lain.

Total anggaran rencana awal Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 sebesar Rp. 67.890.160.240,00,- setelah dilakukan pembahasan melalui forum perangkat daerah, musrenbang serta pembahasan lanjutan total anggaran Badan Kesbangpol menjadi sejumlah Rp. 46.585.606.500,- pengurangan ini dikarenakan telah terjadi kesepakatan pembiayaan pelaksanaan pemilu serentak kepala daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan besaran pembiayaan atau hibah untuk KPU dan Bawaslu.

Lebih lanjut evaluasi rancangan awal RKPD dan hasil evaluasi ditampilkan dalam table 2.3 berikut

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kesbangpol

No	Recana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				73.188.134.235	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				46.585.606.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti		2.409.752.835	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan sesuai standar		3.023.035.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	35.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	4.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	19.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	1.997.908.835	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	2.713.115.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	20 Orang/bul	1.800.981.335	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12 Orang/bulan	2.514.093.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	196.927.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	199.022.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	141.700.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	137.000.000	

No	Recana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.200.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	88.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	80.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.300.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				80.000.000	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</i>	100%	15.000.000	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</i>	100%	11.500.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	1.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	10.000.000	
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah BMD yang terpelihara</i>	4 Unit	110.144.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah BMD yang terpelihara</i>	4 Unit	157.420.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	

No	Recana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	65.000.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	1.500.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10.644.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	34.420.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	81%	545.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	81%	1.560.390.000	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<i>Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>545.000.000</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<i>Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>1.560.390.000</i>	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	55.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 Orang	200.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang	905.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	250.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	191.427.000	

No	Recana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	40.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0	
						Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	30 Orang	463.963.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77%	65.325.181.400	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77%	38.042.801.500	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>		<i>Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun</i>	<i>3 Database</i>	<i>65.325.181.400</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>		<i>Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun</i>	<i>3 Database</i>	<i>38.042.801.500</i>	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	550 Orang	580.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	550 Orang	298.550.000	

No	Recana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	210.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	150.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	64.490.181.400	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	37.594.251.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	71%	2.403.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	71%	2.197.880.000	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		<i>Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>2.403.200.000</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>		<i>Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>2.197.880.000</i>	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	200.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	160.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	33.200.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	15.000.000	

No	Recana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	2.120.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	2.022.880.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	83%	1.305.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	83%	741.500.000	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>		<i>Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun Jumlah Dokumen laporan kegiatanbidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>1.305.000.000</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>		<i>Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun Jumlah Dokumen laporan kegiatanbidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>741.500.000</i>	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	13.600.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	450 Orang	175.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	550 Orang	320.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75 Orang	30.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang	7.900.000	

No	Recana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	1.050.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	400.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100%	1.200.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100%	1.020.000.000	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		<i>Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>1.200.000.000</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		<i>Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>1.020.000.000</i>	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0	0	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	90.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	125 Orang	60.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	304 Orang	350.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 Orang	285.000.000	

No	Recana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu indikatif	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	85.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	75.000.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	600.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	600.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan mewujudkan indikator sasaran yang menjadi kinerja utama Badan Kesbangpol diberikan hibah untuk operasional organisasi kemasyarakatan bentukan Pemerintah yaitu MUI Kabupaten Demak dan FKUB Kab. Demak, selain kedua forum tersebut juga diberikan hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah berdiri sebelum kemerdekaan yaitu NU dan Muhammadiyah sekaligus sebagai mitra dan stakeholder Badan Kesbangpol serta 1 organisasi masyarakat yaitu LDII dan IPHI.

Selain itu juga dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD terdapat aspirasi berupa hibah operasional untuk organisasi kemasyarakatan yaitu untuk NU dan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi pemuda dan ormas, aspirasi dari anggota dewan diakomodir karena mendukung tercapainya indikator sasaran Badan Kesbangpol.

Usulan program dan Kegiatan masyarakat dari usulan masyarakat yang diakomodir Badan Kesbangpol dan pokok pikiran anggota DPRD tercantum dalam table 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesbangpol

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wasbang yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta pemantapan ideologi pancasila dan wasbang			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	855.000.000	1340 Orang	
	Pengembangan Ideologi Dan Karakter Kebangsaan Bagi Generasi Muda Di Kab Demak	Kab. Demak	Jumlah peserta Pengembangan Ideologi Dan Karakter Kebangsaan Bagi Generasi Muda Di Kab Demak	150.000.000	300 Orang	Pokir / Diterima
	Pencegahan Faham Radikal Melalui Penguatan Karakter Kebangsaan Di Kab Demak	Kab. Demak	Jumlah Peserta Pencegahan Faham Radikal Melalui Penguatan Karakter Kebangsaan Di Kab Demak	150.000.000	300 Orang	Pokir / Diterima
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan Pada Masyarakat Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan Pada Masyarakat Kabupaten Demak	300.000.000	300 Orang	Pokir / Diterima
	Kegiatan Ziarah Kebangsaan Kab Demak	Kabupaten Demak	Jumlah peserta Ziarah Kebangsaan Kab Demak	55.000.000	40 Orang	Pokir / Diterima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	Jumlah peserta Pendidikan wasbang kecamatan Guntur Kab. Demak	200.000.000	400 Orang	Pokir / Diterima
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokarsi Indonesia (IDI)			
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik Sistem dan Implementasi Politik			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			250.000.000	450 Orang	
	Peningkatan Pendidikan Politik Perempuan Di Kab Demak	Demak, Kab. Demak	Jumlah PesertaPeningkatan Pendidikan Politik Perempuan Di Kab Demak	150.000.000	300 Orang	Pokir / Diterima
	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Demak, Kab. Demak	Jumlah PesertaSosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	100.000.000	150 Orang	Pokir / Diterima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.427.235.100	12 Laporan	
	Hibah Bantuan kepada Partai Politik	Kabupaten Demak	Jumlah Partai politik yang mendapatkan hibah bantuan keuangan	1.427.235.100	8 Partai	Hibah Bantuan Keuangan kpd Parpol yg memiliki kursi di DPRD
	Hibah Pilser Untuk KPU	Kabupaten Demak	Hibah Pelaksanaan Pimilu serentak Kepala Daerah	28.406.140.000	1 Tahun	
	Hibah Pilser Untuk BAWASLU	Kabupaten Demak	Hibah Pelaksanaan Pimilu serentak Kepala Daerah	6.250.376.400	1 Tahun	
	Hibah Pilser Untuk POLRES	Kabupaten Demak	Hibah Pelaksanaan Pimilu serentak Kepala Daerah	1.000.000.000	1 Tahun	
	Hibah Pilser Untuk KODIM	Kabupaten Demak	Hibah Pelaksanaan Pimilu serentak Kepala Daerah	500.000.000	1 Tahun	
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Ormas yang terdaftar dan aktif			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			100.000.000	150 Orang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
	Pemberdayaan Dan Penigkatan Kinerja Organisasi Masyarakat Di Kab Demak	Kabupaten Demak	Jumlah Peserta Pemberdayaan dan peningkatan kinerja ormas kab. Demak	100.000.000	150 Orang	Pokir / Diterima
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600.000.000	12 Laporan	
	Hibah Kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bonang		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas Nahdlatul Ulama Kab. Demak	200.000.000		Pokir/Diterima Masuk ke Hibah PCNU
	Hibah Kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wedung		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas Nahdlatul Ulama Kab. Demak	100.000.000		Pokir/Diterima Masuk ke Hibah PCNU
	Hibah Kepada Mwc Nu Kecamatan Karangawen		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas Nahdlatul Ulama Kab. Demak	100.000.000		Pokir/Diterima Masuk ke Hibah PCNU
	Bantuan Hibah Untuk Pc Nu Demak		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas Nahdlatul Ulama Kab. Demak	150.000.000		Pokir/Diterima Masuk ke Hibah PCNU
	Bantuan Hibah Untuk Peningkatan Kantor Mwc Nu Wedung, Demak		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas Nahdlatul Ulama Kab. Demak	100.000.000		Pokir/Diterima Masuk ke Hibah PCNU
	Hibah Nu Ranting Desa Gaji Kec. Guntur		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas Nahdlatul Ulama Kab. Demak	50.000.000		Pokir/Diterima Masuk ke Hibah PCNU
	Hibah Pembangunan Gedung Mwc Nu, Dukuh Tempel, Desa Balerejo Rt 05 Rw 01, , Dempet		Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas Nahdlatul Ulama Kab. Demak	20.000.000		Pokir/Diterima Masuk ke Hibah PCNU
	Hibah untuk PCNU	Kabupaten Demak	Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas Nahdlatul Ulama Kab. Demak	700.000.000	1 Tahun	Renja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
	Hibah Kepada MUHAMMADIYAH	Kabupaten Demak	Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas Muhammadiyah	200.000.000	1 Tahun	Renja
	Hibah Kepada LDII	Kabupaten Demak	Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas LDII	100.000.000	1 Tahun	Renja
	Hibah Kepada IPHI	Kabupaten Demak	Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas IPHI	100.000.000	1 Tahun	Renja
	Hibah Kepada Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Demak	Kabupaten Demak	Fasilitasi Kegiatan dan Operasional Ormas PMII	200.000.000	1 Tahun	Pokir
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama			
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Bangsa danKerukunan Beragama dan penghayat kepercayaan			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300.000.000	300 Orang	
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Di Kab Demak	Kabupaten Demak	Jumlah Peserta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Di Kab Demak	150.000.000	300 Orang	Pokir / Diterima

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
	Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Demak Sehat	Kabupaten Demak	Jumlah Peserta Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Demak Sehat	150.000.000	300 Orang	Pokir / Diterima
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400.000.000	12 Laporan	
	Hibah Kepada MUI	Kabupaten Demak	Fasilitas Kegiatan dan Operasional MUI	200.000.000	1 Tahun	Renja
	Hibah Kepada FKUB	Kabupaten Demak	Fasilitas Kegiatan dan Operasional Ormas FKUB	200.000.000	1 Tahun	Renja

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2019-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2019-2024 dengan mengangkat Visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia Maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sedangkan 5 prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia;
2. Peningkatan Infrastruktur strategis;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi;

Sesuai tugas dan fungsinya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

Dalam Misi yang disebut Nawa Cita sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, Salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yaitu “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”, sejalan dengan Misi 1 Bupati dan wakil Bupati Demak disebutkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya dan Misi 3 yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kondusifitas wilayah menjadi kunci dalam tata kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan inventasi daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Demak memang terlihat kondusif namun melalui media online penyebaran Ideologi transinternasional oleh kelompok-kelompok masyarakat masih ada dan terus menyebarkan faham-faham yang akan mengganti ideologi Pancasila, kelompok ini sering menyasar pada generasi muda terutama pelajar dan mahasiswa yang pemahaman tentang ideologi Pancasila masih minim.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol bidang Ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan maka renja Tahun 2024 juga diarahkan untuk pemantapan Ideologi Pancasila dan peningkatan karakter kebangsaan yang akhir-akhir ini ada indikasi gerakan-gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, melalui peningkatan pemantapan ideologi, karakter kebangsaan dan pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat, peningkatan pendidikan politik serta peningkatan kewaspadaan dini masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesbangpol

Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif. Selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak masa bhakti 2021-2026 telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah : **“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”**,.

Untuk melaksanakan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah

- 1. Memperkuat Tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya;
- 2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas, dan berdaya saing;
- 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan isu-isu dan permasalahan dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Bupai dan Wakil Bupati maka tujuan dan sasaran prioritas yaitu

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	80,07
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesbangpol	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesbangpol yang mencapai target	Persen	100
2	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,8
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
3.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0
	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar /intra umat beragama	Kejadian	0
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa	Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa	Persen	82,8
		Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik	Persen	78,10

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 tertuang dalam 6 program dan 11 Kegiatan serta 45 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 10.954.195.853, bila dibandingkan dengan anggaran Tahun 2022 yang sebesar Rp. 11.319.273.665 ada penurunan, anggaran Tahun 2022 lebih besar dikarenakan Hibah untuk Ormas yang turut berjasa memperjuangkan Kemerdekaan RI yaitu NU dan Muhammadiyah serta Pokir Anggota Dewan yang berupa hibah, namun kenaikan bantuan Partai Politik dan banyaknya aspirasi dewan berupa kegiatan Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan turut berpengaruh besarnya anggaran tahun 2023.

Rencana pendanaan program Badan Kesbangpol adalah terdiri dari

1. Program Penunjang Operasional Pemerintah Daerah, Total anggaran sebesar Rp. 3.023.035.000, terbesar dipergunakan untuk gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 2.514.093.000,-.

Pada Program ini untuk mendukung pencapaian 2 indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan dengan target 100%.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Total anggaran sebesar Rp. 1.560.390.000,- anggaran terbesar merupakan akomodir pokir dewan yaitu sebesar Rp. 850.000.000,- dan Pembentukan Paskibraka sebesar Rp. 463.963.000,-

Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdapat 1 Sub Kegiatan yang tidak ada dalam Renstra Badan Kesbangpol, hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, bahwa pembinaan Paskibraka dan purna paskibraka duta Pancasila dilaksanakan oleh perangkat daerah urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pembentukan Paskibraka yang tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga mulai tahun 2024 dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian

indikator kinerja Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan dengan target 81% meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan target 79%.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Total anggaran sebesar Rp. 38.042.801.500,- pagu tersebut terbesar Hibah Pelaksanaan Pemilu serentak untuk KPU sebesar Rp.24.408.140.000, Bawaslu sebesar Rp. 6.250.376.400, Polres Rp.1.000.000.000,- dan Kodim Demak Rp. 500.000.000,- serta Bantuan Parpol sebesar Rp. 1.464.985.100 untuk 8 Parpol yang mempunyai kursi di DPRD Kab. Demak.

Anggaran Program untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan target 77%.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Total anggaran sebesar Rp. 2.197.880.000 pagu terbesar untuk Hibah Ormas NU, Muhamadiyah, LDII, dan IPHI yaitu sebesar Rp. 2.022.880.000.

Anggaran program dan kegiatan ini untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Ormas yang terdaftar dan aktif dengan target 71%, dengan telah terbangunnya sistem aplikasi ormas diharapkan data base ormas lebih tertata dan ormas yang aktif lebih banyak.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan total anggaran sebesar Rp. 741.500.000, anggaran terbesar dipergunakan untuk Hibah MUI dan FKUB masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,-

Anggaran program ini untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama dengan target 83%. Selain itu juga untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yaitu Kasus Konflik Antar Umat Beragama dengan target 0 kasus, 0 berarti tidak ada kasus konflik antar umat beragama di Kabupaten Demak.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,- pagu terbesar dipergunakan untuk fasilitasi Forkopimda.

Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial dengan target 100%. Pada program ini semua potensi konflik yang ada diupayakan dapat tertangani dan terselesaikan pada tingkat bawah, bila tidak bisa selesai baru dinaikkan ke tingkat atasnya.

Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terfasilitasi untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik komunal.

Rincian rencana kerja dan rencana pendanaan Badan Kesbangpol secara lengkap sebagaimana tertera dalam table 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						46.585.606.500							76.254.019.528	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						46.585.606.500							76.254.019.528	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						46.585.606.500							76.254.019.528	
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	3.023.035.000						-	2.837.638.128	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	4.000.000			-	-	Meningkatnya capaian sasaran strategis Perangkat Daerah	-	19.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	-	Meningkatnya capaian sasaran strategis Perangkat Daerah	-	19.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	2.713.115.000			-	-	Meningkatnya capaian sasaran strategis Perangkat Daerah	-	2.489.794.128	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	11 Orang	12 Orang	18 Orang/bulan	2.514.093.000	-	pendapatan asli daerah (pad), dana transfer umum-dana alokasi umum	-	-	Meningkatnya capaian sasaran strategis Perangkat Daerah	-	2.321.994.128	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Dokumen	199.022.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya capaian sasaran strategis Perangkat Daerah	-	167.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100%	100%	137.000.000			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	-	140.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	12 Paket	1 Paket	1 Paket	7.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	-	7.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	24.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	-	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	6.500.000	Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		6.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	15.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		1.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		3.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342 Laporan	59 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	80.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		88.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 Persen	100 Persen	100%	100 %	11.500.000			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	-	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		3.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	10.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		12.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	4 Unit	3 Unit	15 Unit	4 Unit	157.420.000			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	-	173.644.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	1 Unit	1 Unit	40.000.000	Kab. Demak, Demak, Semua Kel/Desa	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		35.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	12 Unit	12 Unit	65.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		60.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	9.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		9.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		9.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	1 Unit	1 Unit	34.420.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif		60.644.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	86,0 %	76,4 %	77,0 %	81%	1.560.390.000						-	2.575.000.000	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.560.390.000			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa	-	2.575.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	320	-	3400	1260 Orang	905.000.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		1.200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	11050 Orang	2380 Orang	350	350 Orang	191.427.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		875.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	1500 Orang	250 Orang	30 Orang	30 Orang	463.963.000	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	-	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		500.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	82,0 %	75,6 %	76,0 %	77 %	38.042.801.500						-	65.658.181.400	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Database	38.042.801.500			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa	-	65.658.181.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	1820 Orang	600 Orang	3600 Orang	550 Orang	298.550.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		958.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	150		150 Orang	150 Orang	150.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		210.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	37.594.251.500	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		64.490.181.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<i>Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif</i>	74,0 %	68,0 %	70,0 %	71 %	2.197.880.000						-	2.503.200.000	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.197.880.000			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa	-	2.503.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	2050 Orang	60 Orang	600 Orang	275 Orang	160.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		350.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>			65 Orang	60 Orang	15.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		33.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.022.880.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		2.120.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	90,0 %	78,0 %	80,0 %	83 %	741.500.000						-	1.455.000.000	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun Jumlah Dokumen laporan kegiatanbidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	741.500.000			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama	-	1.455.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1okumen	1 Dokumen	13.600.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama		50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2300 Orang	190 Orang	650 Orang	650 Orang	320.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama		325.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			30 Orang	30 Orang	7.900.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama		30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama		1.050.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100%	1.020.000.000						-	1.225.000.000	

	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.020.000.000			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa	-	1.225.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 Orang	200 Orang	800 Orang	150 Orang	60.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		190.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 Orang	56 Orang	60 Orang	304 Orang	285.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		350.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		85.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000	Kab. Demak, Demak, Bintoro	dana transfer umum-dana alokasi umum	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan Kesatuan Bangsa		600.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							46.585.606.500							76.254.019.528	

BAB V
PENUTUP

5. 1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Demak tahun 2024 merupakan rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan Badan Kesbangpol.

Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Demak berpedoman pada:

1. Tugas dan fungsi Badan Kesbangpol sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum di daerah.
2. Isu-isu strategis Badan Kesbangpol yang digali berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya
3. Visi dan misi Bupati Demak terpilih.
4. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program & Kegiatan Periode Sebelumnya guna perumusan kegiatan, alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Badan Kesbangpol
5. Usulan Program Serta Kegiatan dari Masyarakat dalam perumusan kegiatan dalam rancangan Renja guna mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas

5. 2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam satu tahun anggaran 2024.

Pelaksanaan dokumen Renja tahunan merupakan bagian dari pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol dan sebagai arahan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol ini diharapkan mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan sasaran Renstra yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan.

5. 3 Rencana Tindak Lanjut

Guna mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Demak yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Perencanaan yang bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan, diharapkan untuk

1. Bekerja keras serta berbenah diri, meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerja sama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal;
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi;
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi;
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan;
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja 2024 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Demak, Agustus 2023

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN DEMAK

KENDARSIH IRIANI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700708 199503 2 003